

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

##### 1. Kondisi Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah setingkat provinsi terkecil kedua setelah provinsi DKI Jakarta dan terletak di tengah Pulau Jawa, dikelilingi oleh Provinsi Jawa Tengah dan termasuk zona tengah bagian selatan dari formasi geologi Pulau Jawa. Di sebelah selatan terdapat garis pantai sepanjang 110 km berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sebelah utara menjulang Gunung Merapi ( $\pm 2.968$  m), salah satu dari gunung yang paling aktif di dunia. Luas keseluruhan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.185,80 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Di sebelah barat mengalir Sungai Progo, yang berawal dari Jawa Tengah, dan Sungai Opak di sebelah timur yang berawal dari Gunung Merapi yang bermuara di laut selatan.

Ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Kota-kota lainnya adalah Bantul, Wates, Sleman dan Wonosari. Secara administratif Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam satu kota dan empat kabupaten, dimana Kota Yogyakarta membentuk kesatuan administrasi sendiri. Jarak ke ibu kota negara Jakarta adalah 600 km. Kota

kota besar yang paling dekat adalah Semarang di Jawa Tengah (120 km) dan Surabaya di Jawa Timur (320 km).

Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat dan tenggara dikelilingi oleh barisan pegunungan di sebelah utara oleh Gunung Merapi. Pegunungan di bagian selatan, terutama di Kabupaten Gunung kidul mencapai ketinggian sampai 700 m. Faktor cuaca menyebabkan iklim tropis sepanjang tahun dengan suhu rata-rata, yaitu dari 25°C sampai 32°C, dan di tempat-tempat yang lebih tinggi suhunya lebih dingin, kelembaban udara tergantung pada musim, umumnya berkisar pada 84%. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan Maret. Musim kemarau berlangsung dari bulan April sampai bulan September. Jumlah curah hujan dalam jangka waktu satu tahun mencapai 1.750 mm, intensitas tertinggi terjadi pada bulan Januari sampai Maret, dimana curah hujan perbulan mencapai lebih dari 300 mm setiap m<sup>2</sup>. Selama musim kemarau angin Muson bertiup dari timur dan hujan turun kurang lebih 3 mm setiap m<sup>2</sup>.

## **2. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755

sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

- 1) Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.
- 2) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
- 3) Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah)

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), diatur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 pernah dijadikan sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia.

Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kadipaten Pakualaman

dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

### **3. Geografi dan Lingkungan Hidup**

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 7o3'-8o12' Lintang Selatan dan 110o00'-110o50' Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km<sup>2</sup>. Wilayah administratif DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

1. Kota Yogyakarta (luas 32,50 km<sup>2</sup>, terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan);
2. Kabupaten Bantul (luas 506,85 km<sup>2</sup>, terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa);
3. Kabupaten Kulon Progo (luas 586,27 km<sup>2</sup>, terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa);
4. Kabupaten Gunungkidul (luas 1.485,36 km<sup>2</sup>, terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa);
5. Kabupaten Sleman (luas 574,82 km<sup>2</sup>, terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa).

Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi sebagai berikut:

- a) Satuan fisiografi Gunungapi Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api termasuk juga bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunungapi aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai obyek penelitian, pendidikan, dan pariwisata.
- b) Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunung Kidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping (*limestone*) dan bentang alam *karst* yang tandus dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari (Wonosari Basin) yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato Wonosari (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang.
- c) Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kulon Progo bagian utara merupakan bentang lahan struktural

*denudasional* dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil.

- d) Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan *fluvial* (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran *aluvial*, membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan *marin* dan *eolin* yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan *marin* dan *eolin* di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan *gumuk* pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas

tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang, namun juga banyak terjadi pencemaran lingkungan.

Dalam bidang lingkungan hidup, akibat pengelolaan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup menyebabkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam menipis. Kawasan hutan dengan luas 23,54% dari luas wilayah DIY kurang mencukupi sebagai standar lingkungan hidup.

Di samping itu, pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.

Pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan meningkatnya polutan udara seperti CO, NO<sub>2</sub>, HC dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat selain juga bertambahnya jumlah kendaraan bermotor .

Kualitas air tanah dan air permukaan mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan. Kualitas air tanah dan air permukaan diperkirakan terus mengalami ancaman

pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta penambahan usaha/kegiatan.

#### 4. Data Demografi.

sebagaimana data yang tersaji dalam provinsi daerah istimewa Yogyakarta dalam *angka 2012*, penulis dapat menyajikan beberapa data demografi sebagai berikut.

Tabel 2.1

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta

| Tahun                                      | 2011      | 2010      | 2009      | 2008      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah pria (jiwa)                         | 1.709.038 | 1.711.363 | 1.740.800 | 1.716.215 |
| Jumlah wanita (jiwa)                       | 1.748.453 | 1.790.506 | 1.727.700 | 1.752.287 |
| Total jiwa                                 | 3.457.491 | 3.501.869 | 3.468.500 | 3.468.502 |
| Pertumbuhan penduduk                       | -         | 1         | 100       | 38        |
| Kepadatan penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> ) | 1.085     | 1.085     | 1.099     | 1.089     |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, *Daerah Istimewa Yogyakarta 2011*

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta**

| Region          | Kategori             | Jumlah penduduk (jiwa) |           |         |           |
|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|
|                 |                      | 2011                   | 2010      | 2009    | 2008      |
| Bantul          | Jumlah Pria (jiwa)   | 459.459                | 454.491   | -       | 414.046   |
|                 | Jumlah Wanita (jiwa) | 461.804                | 457.012   | -       | 428.010   |
|                 | Total (jiwa)         | 921.263                | 911.503   | -       | 842.056   |
| Gunung kidul    | Jumlah Pria (jiwa)   | 327.841                | 326.703   | 334.519 | 335.013   |
|                 | Jumlah Wanita (jiwa) | 350.157                | 348.679   | 353.626 | 351.759   |
|                 | Total (jiwa)         | 677.998                | 675.382   | 688.145 | 686.772   |
| Kulon progo     | Jumlah Pria (jiwa)   | 190.761                | 190.694   | -       | 181.470   |
|                 | Jumlah Wanita (jiwa) | 199.446                | 198.175   | -       | 193.313   |
|                 | Total (jiwa)         | 390.207                | 388.869   | -       | 374.783   |
| Sleman          | Jumlah Pria (jiwa)   | 554.636                | 547.885   | -       | 532.905   |
|                 | Jumlah Wanita (jiwa) | 552.668                | 545.225   | -       | 507.315   |
|                 | Total (jiwa)         | 1.107.304              | 1.093.110 | -       | 1.040.220 |
| Kota yogyakarta | Jumlah Pria (jiwa)   | 190.761                | 190.694   |         | 181.470   |
|                 | Jumlah Wanita (jiwa) | 199.446                | 198.175   | -       | 193.313   |
|                 | Total (jiwa)         | 390.207                | 388.869   | -       | 374.783   |
| Total           | Jumlah Pria (jiwa)   | 1.723.458              | 1.710.467 | 334.519 | 1.644.904 |
|                 | Jumlah Wanita (jiwa) | 1.763.521              | 1.747.266 | 353.626 | 1.673.710 |
|                 | Total (jiwa)         | 3.486.979              | 3.457.733 | 688.145 | 3.318.614 |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011

## 5. Pendidikan.

sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan karena merupakan dasar sumberdaya manusia sebagai tiang kekuatan negara Republik Indonesia. Salah satu program pemerintah dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu dasar sumberdaya manusia dari usia dini. Untuk itu, sudah seharusnya warga negara yang berusia sekolah 0-17 tahun harus mengenyam pendidikan dasar SD-SMA. Untuk mengukur indikator pembangunan manusia tidak luput harus menggunakan data dasar pendidikan sebagai tolak ukur dalam membuat kebijakan, perencanaan dan evaluasi.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011/2012 jumlah sekolah, Kelas, murid, Guru dan Biaya murid terhadap Guru adalah sebagai

**Tabel 2.3**

**Jumlah Sekolah Negeri Dan Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran  
2011/2012**

| No | Kabupaten/kota | TK |      |      | SD   |     |       | SLB |    |    | SMP |     |     | SMA |    |     | SMK |     |     |
|----|----------------|----|------|------|------|-----|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|    |                | N  | S    | J    | N    | S   | J     | N   | S  | J  | N   | S   | J   | N   | S  | J   | N   | S   | J   |
| 1  | Kulon Progo    | 3  | 308  | 311  | 289  | 62  | 351   | 1   | 6  | 7  | 36  | 28  | 65  | 11  | 5  | 16  | 10  | 26  | 36  |
| 2  | Bantul         | 1  | 498  | 499  | 289  | 73  | 353   | 2   | 14 | 16 | 47  | 38  | 85  | 19  | 15 | 34  | 13  | 28  | 41  |
| 3  | Gunung Kidul   | 7  | 561  | 568  | 431  | 55  | 486   | 1   | 7  | 8  | 59  | 47  | 107 | 11  | 12 | 23  | 12  | 30  | 42  |
| 4  | Sleman         | 4  | 482  | 568  | 379  | 122 | 501   | 1   | 26 | 27 | 54  | 52  | 106 | 17  | 28 | 45  | 8   | 45  | 53  |
| 5  | Yogyakarta     | 2  | 207  | 209  | 99   | 76  | 175   | 4   | 5  | 9  | 16  | 42  | 58  | 11  | 36 | 47  | 8   | 23  | 31  |
|    | Provinsi DIY   | 17 | 2056 | 2073 | 1478 | 388 | 1.866 | 9   | 58 | 67 | 212 | 208 | 420 | 69  | 96 | 165 | 51  | 152 | 203 |

Keterangan :

- N : negeri
- S : Swasta
- J : Jumlah

Sumber data : [pendidikan-diy.go.id](http://pendidikan-diy.go.id)

**Tabel 2.4**

**Data Jumlah Madrasah Negeri Dan Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  
Pelajaran 2011/2012**

| No | Kabupaten/Kota | RA  | MI |     |     | MTs |    |    | MA |    |    |
|----|----------------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|    |                | S   | N  | S   | J   | N   | S  | J  | N  | S  | J  |
| 1. | Kulonprogo     | 13  | 4  | 23  | 27  | 6   | 6  | 12 | 3  | 1  | 4  |
| 2. | Bantul         | 21  | 3  | 24  | 27  | 9   | 13 | 22 | 4  | 7  | 11 |
| 3. | Gunungkidul    | 66  | 11 | 64  | 75  | 9   | 20 | 29 | 1  | 4  | 5  |
| 4. | Sleman         | 35  | 2  | 18  | 20  | 10  | 7  | 17 | 5  | 7  | 12 |
| 5. | Yogyakarta     | 1   | 1  | 1   | 2   | 1   | 6  | 7  | 2  | 4  | 6  |
|    | Provinsi DIY   | 136 | 21 | 130 | 151 | 35  | 52 | 87 | 15 | 23 | 38 |

Tabel 2.5

Indikator Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta

| Indikator |                     | SD/MI    | SMP/MTs  | SM/MA    |
|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 1.        | APK                 | 111,78 % | 115,43 % | 88,04 %  |
| 2.        | APM                 | 97,54 %  | 81,13 %  | 63,65 %  |
| 3.        | Angka Melanjutkan   | 109,32 % | 105,63 % | 105,40 % |
| 4.        | Angka Putus Sekolah | 0,07 %   | 0,16 %   | 0,51 %   |
| 5.        | Angka Kelulusan     | 98,69 %  | 98,46 %  | 98,74 %  |
| 6.        | Angka Mengulang     | 3,67 %   | 0,35 %   | 0,25 %   |
| 7.        | Rasio Klas/ R.Klas  | 1        | 1        | 1        |
| 8.        | Rasio Siswa/Klas    | 21       | 29       | 29       |
| 9.        | Rasio Siswa/Guru    | 13       | 12       | 9        |

Sumber data : [pendidikan-diy.go.id](http://pendidikan-diy.go.id)

**B. Gambaran Umum PDI-Perjuangan**

Setiap organisasi yang ada tentunya akan selalu memiliki AD dan ART yang didalamnya berisi tentang hal-hal teknis yang kemudian dapat dijadikan panduan dalam menjalankan organisasi tersebut. Begitu juga organisasi politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI

Dalam lingkungan internal partai sendiri merupakan bagian terpenting dalam setiap organisasi sebagai tongkat utama yang akan dibawa untuk mencapai kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya. Yang kemudian harus diperkokoh sebelum masuk ke lingkungan Eksternal Parpol.

Lingkungan Internal Partai Politik sendiri terdiri atas:

- a) Strategi inti platform
- b) Sumber Daya
- c) Jaringan dengan pemilih, dll

### **1. VISI PDI-Perjuangan**

Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI-Perjuangan adalah :

1. Terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis adil dan makmur

## 2. MISI PDI-Perjuangan

Misi partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8 dan 9 Anggaran Dasar partai, yaitu :

1. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai.
2. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
3. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan Rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
4. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi Rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
5. Memperjuangkan kepentingan Rakyat dibidang ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis.
6. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
7. Membentuk dan membangun karakter bangsa

8. Mendidik dan mencerdaskan Rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
9. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga Negara.
10. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
12. Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dan
13. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan Negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### **3. Fungsi**

- 1) menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa
- 2) mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga

- 3) Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4) Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat pancasila.
- 5) Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

#### **4. Tujuan**

##### **a. Tujuan Umum Partai**

- 1) Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur.

##### **b. Tujuan Khusus Partai**

- 1) menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.
- 2) memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, social, dan budaya secara demokratis.
- 3) Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## **5. Tugas Partai**

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
- c. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
- d. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
- e. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- f. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan

## 6. Sumber Daya Partai Politik

### a. Keanggotaan

#### 1) Syarat untuk menjadi anggota partai adalah

- Warga negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah.
- Menyetujui dan menaati Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Partai.
- Bersedia menaati dan menegakkan Disiplin Partai.
- Bersedia mengikuti Kegiatan Partai

2) Calon anggota harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota secara tertulis dan memenuhi persyaratan yang kemudian disampaikan kepada pengurus partai.

3) Seluruh calon anggota harus melalui masa pembinaan.

4) Calon anggota yang sudah memenuhi persyaratan sebelum dilantik menjadi anggota wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai anggota.

5) Pengesahan seseorang menjadi anggota partai diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai.

6) Kepada setiap anggota partai diberikan Kartu Tanda Anggota Partai oleh Dewan Pimpinan cabang partai

- 7) Bentuk, pengesahan, dan registrasi permohonan Kartu Tanda Anggota diatur dalam peraturan partai.
- 8) Dewan Pimpinan Cabang Partai membina, melatih dan mendidik Anggota Partai di wilayahnya.
- 9) Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai mempunyai Data Keanggotaan partai di wilayahnya.

b. Kader Partai

Kader partai dipilih, ditetapkan, dan diangkat dari anggota partai yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah memiliki kemantapan Ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi.
- 2) Telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada partai.
- 3) Telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran partai dan atau dalam masyarakat.
- 4) Telah lulus kursus kader yang diselenggarakan oleh Partai dan memiliki moral yang baik.
- 5) Kader partai dipilih, ditetapkan, dan diangkat dari anggota Partai yang diatur dalam Peraturan Partai

## **7. Kepengurusan dan Organisasi**

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, ketua DPC bertugas, bertanggungjawab dan berwenang untuk memimpin partai dalam lingkup kabupaten/kota baik ke dalam dan keluar, menjaga eksistensi dan ideologi partai. Menjaga solidaritas internal, baik struktural, kader maupun simpatisan.

## **8. Kebijakan Jangka Panjang**

Setiap organisasi baik partai politik atau bukan pasti memiliki kebijakan jangka panjang yang akan dicapai kedepannya. Begitupun yang dimiliki oleh PDI-Perjuangan, melalui faktor-faktor strategis yang kemudian secara signifikan penyusunan program perjuangan “Jalan Menuju Kemenangan”<sup>51</sup>. Selain itu PDI-Perjuangan juga menginginkan kemenangan mutlak pada pemilu 2014 nanti. Dengan kekuasaan penuh mereka beranggapan dengan kekuasaan penuh maka perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat dicapai. Berikut ini “Jalan Menuju Kemenangan” dari PDI-Perjuangan dilihat dari berbagai bidang yaitu:

- a. Kegiatan persiapan partai-partai pesaing, khususnya partai urutan 5 besar pemilu 2009 yang harus diperhitungkan dalam menghadapi pemilu 2014.

b. Tantangan sosial ekonomi 5 tahun kedepan yang harus diperhatikan dan dicari pemecahan masalahnya. Yang kemudian dapat menyebabkan munculnya ancaman berupa peningkatan kerusuhan dan kriminalitas, yaitu:

- Meningkatnya angka anak putus sekolah
- Meningkatnya angka kemiskinan
- Meningkatnya angka pengangguran
- Sempitnya lapangan kerja

c. Tantangan ideologi 5 tahun kedepan:

- Merebaknya ideologi liberalism pragmatism yang semakin merusak sendi-sendi gotong royong dalam masyarakat.
- Berkembangnya cara berfikir dan sistem perpolitikan yang bersifat kalkulatif transaksional.
- Meningkatnya gerakan ekstrim fundamentalis agama yang mengancam ideologi bangsa, kebhinekaan, dan integrasi bangsa

d. Tantangan politik 5 tahun kedepan

- Anggapan negatif masyarakat tentang partai politik.
- Banyaknya partai politik yang bertarung dalam pemilu, yang menyebabkan kebingungan rakyat dalam menentukan pilihan

- Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam program-program partai maupun dalam pemilu.
  - Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antara pusat dengan daerah yang menghadirkan ancaman disintegrasi bangsa.
- e. Tantangan hukum 5 tahun kedepan:
- Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi yang belum menyeluruh dan masih bersifat tebang pilih.
  - Pembenahan instansi-instansi penegak hukum yang belum efektif dalam melakukan reformasi.

## 9. Hubungan dengan Konstituen

Menjaga *link* atau hubungan dengan konstituen merupakan hal yang sangat penting, yang juga merupakan upaya untuk menjalin hubungan yang baik antar lapisan struktural PDI-Perjuangan. Dari data dan hasil wawancara, upaya yang dilakukan PDI-Perjuangan untuk memperoleh dan menjaga *link* dengan konstituen lebih menekankan untuk melakukan kegiatan rutin dan pertemuan-pertemuan yang berupa rapat-rapat guna membahas hal-hal yang mengikat kepentingan

rakyat. Berikut rincian atau cara-cara yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan untuk menjaga link dengan konstituennya.<sup>52</sup>

### **C. Kepengurusan dan Organisasi**

Kepengurusan dan Organisasi DPD PDI-Perjuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua DPD bertugas, bertanggung jawab dan berwenang untuk memimpin partai dalam lingkup provinsi, kota dan kabupaten baik ke dalam dan luar, menjaga eksistensi dan ideologi partai. Menjaga soliditas internal, baik struktur, kader, maupun simpatisan.

Berikut sususna kepengurusan DPD PDI-Perjuangan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2010-2015;

---

<sup>52</sup> Piagam Perjuangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, PDI-P. Ketetapan Kongres III PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, 06 April 2010, No. 00/TAP/KONGRES III/PDI P/2010

**SURAT KETETAPAN DPP PDI PERJUANGAN**

**Nomor : 23-B/TAP-DPD/DPP/XI/2012 TANGGAL 12 NOVEMBER 2012**

| NO | JABATAN   | NAMA                             |
|----|---|----------------------------------|
| 1  | KETUA   | Drs. H.M. IDHAM SAMAWI           |
| 2  | Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga                         | ESTI WIJAYATI                    |
| 3  | Wakil Ketua Bidang Organisasi   | SUPRIYANTO, ST, MM.              |
| 4  | Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen                      | Y. WIDI PRAPTOMO, SE.            |
| 5  | Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi                                   | BAMBANG EKO PRABOWO, SIP.        |
| 6  | Wakil Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana                                       | Drs. SUDARTO                     |
| 7  | Wakil Ketua Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan . | GIMMY RUSDIN SINAGA, SE.         |
| 8  | Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja                                 | YUNI SATIA RAHAYU, S.Sos, M.Hum. |
| 9  | Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Budaya dan Keagamaan                           | EKO SUWANTO, ST, M.Si.           |
| 10 | Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, UKM dan Koperasi                    | DWI WAHYU BUDIANTORO, S.Pd.      |
| 11 | Wakil Ketua Bidang Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga                      | ANDRIANA WULANDARI, SE.          |
| 12 | Wakil Ketua Bidang Infrastruktur, Transportasi dan Perumahan                  | EDY SUMARMI, ST.                 |
| 13 | Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan                          | RYS. GUNAWAN HANDOYO HB. SH.     |
| 14 | Wakil Ketua Bidang Energi, Pertambangan, Pemerintahan dan Otonomi Daerah      | Drs. UNTORO HARYADI, M.Si.       |
| 15 | SEKRETARIS  | Drs. BAMBANG PRASWANTO, M.Sc.    |
| 16 | Wakil Sekretaris Bidang Internal  | SUPARDI ANTONO                   |
| 17 | Wakil Sekretaris Bidang Program   | H. AHMAD, SE                     |
| 18 | BENDAHARA   | H.YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE. |
| 19 | Wakil Bendahara   | HENY KUSHARYATI, SIP.            |

## 1. Visi & Misi

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI-Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama diatas. Untuk itu, PDI-Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI-Perjuangan bertugas untuk:

1. Pertama, mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Kedua, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.
3. Ketiga, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat syarat minimum bagi masyarakat cita-cita bersama bangsa

Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI-Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur;
3. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;
4. Memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa.

5. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
6. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
7. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila; dan
8. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara